

Tan'sal

ANALISIS KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA: KASUS DI DESA NGANJAT KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN

Rendy Gilang Permana¹, Teuku Afrizal², Ari Subowo³

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Email : permanag00@gmail.com

ABSTRACT

Tourism villages are one of the applications of community-based and sustainable tourism development. It is hoped that through the development of the tourism village there can be equity in accordance with the concept of sustainable tourism development. Nganjat Village is a tourism village located in Polanharjo District, Klaten Regency. The tourism development process in Nganjat Village has not yet seen significant progress. The role of stakeholders in the implemented training system has not gone well. This study used qualitative research methods. The purpose of this study is to analyze the process of collaboration in the management of tourist villages and their driving and inhibiting factors. The theory used is the collaborative process theory according to Ansell and Gash. The result of the research is that the process of implementing the laser is still not going well because of less effective communication and less optimal roles between stakeholders. Factors driving collaboration are community empowerment, job creation, moments to unite village communities, and providing a platform for Karang Taruna to participate in supporting village progress. The inhibiting factors are the unstable condition of Karang Taruna, ineffective communication, the absence of Bumdes, and the lack of stakeholders who are experts in managing sustainable tourism. The researcher recommends collaborating with academics who are experts in the field of sustainable tourism management and improving aspects of communication between stakeholders.

Keywords: Collaboration, Role of Stakeholders, Tourism Village.

¹ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

² Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

³ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam memainkan peran sentral pedesaan perlu adanya pembangunan desa untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Dalam strata pemerintahan terkecil, Desa mempunyai peran sentral dalam agenda pembangunan nasional dimana sebagian masyarakat Indonesia hidup di pedesaan.

Di Indonesia, sektor pariwisata dapat dikatakan sebagai penggerak perekonomian sehingga perlu diperhatikan dengan baik supaya dapat terus berkembang. Dengan kata lain, keberadaan pariwisata memberi pemasukan ataupun pendapatan bagi Desa. Kesejahteraan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh keberadaan pariwisata di Pedesaan.

Desa wisata merupakan salah satu penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Dengan potensi unik dari desa tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke desa wisata tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Merujuk pada pentingnya

pengembangan sektor pariwisata dan pengembangan desa maka pelaksanaannya diperlukan lebih banyak *stakeholders* yang terlibat.

Dalam konteks pengembangan desa wisata terdapat *stakeholders* internal maupun eksternal. *Stakeholders* eksternal diantaranya seperti akademisi, swasta, media, dll. Dan *stakeholders* internal diantaranya adalah organisasi formal pemerintah desa serta organisasi non formal karang taruna. Pengelolaan desa wisata dengan sistem kolaborasi antar *stakeholders* dapat lebih efektif, mengingat pengelolaan pariwisata akan dapat berkembang dengan baik apabila terdapat peran yang saling mendukung antar *stakeholders*.

Kolaborasi merupakan suatu proses dimana para *stakeholders* berinteraksi serta bernegosiasi, bersama-sama menciptakan suatu aturan dan struktur yang dapat mengatur hubungan mereka dan cara-cara bertindak atau memutuskan pada isu-isu yang dibawa (Thomson & Perry, 2006). Dengan diterapkannya konsep kolaborasi maka potensi-potensi pariwisata akan lebih dapat dikembangkan dengan berbagai inovasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep kolaborasi pentahelix dalam pengelolaan desa wisata. Kolaborasi pentahelix merupakan kegiatan Kerjasama yang melibatkan 5 (lima) bidang

yaitu: Academic, Business, Community, Government, dan media, konsep ini diketahui akan mempercepat pengembangan potensi desa wisata yang cukup besar (Rahu, 2021). Salah satu desa wisata yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan adalah desa wisata Nganjat yang terletak di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Potensi alam yang baik tentunya membuat Kabupaten Klaten mempunyai potensi wisata yang cukup baik. Pada daerah dataran rendah di Kabupaten Klaten memiliki potensi wisata air yang sangat diandalkan karena banyak sumber mata air di daerah itu. Salah satu desa wisata yang ada di klaten yaitu desa wisata ikan nila yang berada di Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Desa Nganjat memiliki potensi pariwisata yang baik karena mempunyai ciri khas fauna ikan nila. Mayoritas warga di Desa Nganjat juga memilih untuk memelihara ikan nila sebagai sumber pendapatannya. Letak Desa Nganjat yang berada dekat dengan banyak mata air menyebabkan desa tersebut memiliki irigasi yang baik sehingga sangat mendukung untuk memelihara ikan nila. Selain itu, Desa Nganjat juga memiliki potensi obyek wisata air. Ciri khas fauna ikan nila tentunya menjadi potensi utama wisata di Nganjat, namun adanya kolam renang juga dapat menjadi potensi untuk

menarik wisatawan datang berkunjung ke Desa Nganjat.

Dalam pengelolaan desa wisata yang ada di Desa Nganjat menggunakan sistem kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Karang Taruna. Dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut terdapat permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan desa wisata tersebut. Proses kolaborasi yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan proses pengembangan wisata di Desa Nganjat masih belum terlihat perkembangan yang signifikan. Proses kolaborasi antara pemerintah desa dan karang taruna dalam pengelolaan desa wisata tersebut terdapat kendala dalam tahapan – tahapannya. Peran kedua *stakeholders* tersebut dalam pelaksanaan proses kolaborasi masih belum dilakukan secara maksimal. Hubungan koordinasi yang terjalin diantara kedua *stakeholders* tersebut juga belum efektif sehingga menghambat proses kolaborasi.

Dalam proses kolaborasi terdapat berbagai macam masalah yang timbul, seperti intensitas komunikasi, penghematan anggaran, krisis kepercayaan, komitmen dan pemahaman pembagian tanggung jawab. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah proses kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten?
2. Apakah faktor pendorong dan penghambat kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah diajukan, yaitu untuk menganalisis proses kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya di Desa Nganjat, Kecamatan

D. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi Publik dapat diartikan sebagai keseluruhan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah melalui sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia (Ibrahim,2007). Sedangkan menurut Pasolong (2007) administrasi publik ialah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan

tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan public secara efektif serta efisien.

2. Manajemen Publik

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan pengorganisasian serta pennggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan orgaanisasi (James F. Stooner, 2004). Menurut Mary Parker Follet (2007) manajemen merupakan proses, sebab dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut saling berintegrasi untuk membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga manajemen disebut sebagai sistem.

3. Manajemen Publik dan Analisis Stakeholders.

Dalam manajemen publik terdapat empat prinsip yang fundamental menjadi bagian terpenting dalam administrasi publik dengan cakupannya lebih luas, karena manajemen publik merupakan studi interadisipliner yang mencakup aspek politik, sosial, kultural yang mampu memberikan perubahan pada pemerintah maupun di luar pemerintah. Hubungan dan koordinasi berbagai

peran *stakeholders* dalam suatu destinasi membentuk produk wisata yang berkualitas dan citra destinasi yang mudah dikenali, mencapai keunggulan dan daya saing jangka panjang, serta pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan (Miočić, 2016). Oleh karena itu, kolaborasi antar *stakeholders* dirasa dapat berperan penting untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen publik.

4. Kolaborasi *Stakeholders*.

Thomson & Perry (2006) menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan suatu proses dimana para *stakeholders* berinteraksi serta bernegosiasi, bersama-sama menciptakan suatu aturan dan struktur yang dapat mengatur hubungan mereka dan cara-cara bertindak atau memutuskan pada isu-isu yang dibawa. Ansell dan Gash (2007) menyatakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir strategi baru dalam pemerintahan yang disebut dengan *collaborative governance* sedang berkembang, dimana bentuk tata kelola ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang bertemu di dalam suatu forum dengan tujuan untuk mengambil keputusan yang mengarah pada kesepakatan.

5. Pengelolaan Pariwisata

Pariwisata ialah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah (Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 tahun 2009). Dapat disimpulkan bahwa wisata merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan menuju suatu tempat tujuan wisata diluar keseharian maupun lingkungan tempat tinggal dan melakukan persinggahan sementara waktu yang didorong didasarkan atas rasa kesenangan dan tanpa ada maksud untuk mencari nafkah.

6. Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Bentuk dari desa wisata adalah pengembangan model desa yang dijadikan obyek wisata yang lengkap pada desa tersebut (Mustangin et al., 2017). Menurut Permanasari (2010) dalam pembangunan desa wisata memerlukan perencanaan yang matang sehingga dapat menjadi kenangan bagi wisatawan. Menurut Nuryanti (1992) desa wisata ialah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, secara analisis deskriptif berarti memiliki deskripsi data dalam bentuk verbal, serta perilaku yang dapat diamati. Mengingat penelitian ini akan meneliti mengenai Analisis Kolaborasi dalam Pengelolaan Desa Wisata di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, maka dari itu penelitian ini dalam menjelaskan fenomena yang terjadi guna memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi di lapangan menggunakan deskriptif kualitatif.

Data dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber-sumber utama penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada proses kolaborasi pengelolaan Desa Wisata di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti melalui literatur seperti jurnal; artikel; berita dalam situs-situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian, serta dokumen terkait kegiatan bank sampah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek tersebut, yaitu Kepala Desa Nganjat dan Karang Taruna Desa Nganjat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*)

Dialog *stakeholders* ini dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan yang saling menguntungkan bagi para *stakeholders* bila dapat berkolaborasi. Tahapan dialog tatap muka berdampak terhadap adanya komunikasi yang dijalin bersama antar *stakeholders*.

Tahapan dialog *face to face* dalam pengelolaan desa wisata di Desa Nganjat merupakan tahapan awal terjadinya kesepakatan antara pemerintah desa dan karang taruna yang berdampak terhadap komunikasi antar *stakeholders*. Berdasarkan kesepakatan tersebut dapat memunculkan keuntungan bagi kedua *stakeholders*. Dalam tahapan *face to face dialogue* dapat diketahui bahwa, (i) adanya kesepakatan secara lisan antara pemerintah desa dan karang taruna, (ii) adanya sosialisasi mengenai bagaimana rencana dan tujuan pengelolaan desa wisata kedepannya, (iii) menurunnya rutinitas koordinasi antar *stakeholders* dan pada saat ini hanya dilakukan secara perwakilan. Diketahui juga terdapat keuntungan yang timbul dari kesepakatan kolaborasi tersebut, diantaranya (i) adanya keuntungan untuk menekan biaya operasional, (ii) adanya kegiatan rutin positif bagi karang taruna, dan (iii) adanya pemasukan uang

kas bagi karang taruna. untuk lebih jelasnya tentang dialog antar muka dalam pengelolaan desa wisata di Desa Nganjat. Dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan tersebut terdapat kesepakatan antara pemerintah desa dan karang taruna untuk berkolaborasi. Melalui kesepakatan tersebut sehingga dapat memunculkan keuntungan bagi kedua *stakeholders*, tetapi terdapat permasalahan yang timbul dalam aspek komunikasi antar *stakeholders* yang mulai menurun.

2. Tahapan Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para *stakeholders*. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi. Membangun kepercayaan antar *stakeholders* harus dilakukan untuk saling menguatkan dalam kolaborasi pengelolaan desa wisata.

Pembagian peran diantara kedua *stakeholders* tersebut dilaksanakan dengan membagi tugas pemerintah desa sebagai manajemen pengelolaan dan karang taruna sebagai pelaksana di lapangan. Kepercayaan yang timbul pada pelaksanaan peran tersebut diantaranya, (i) adanya kepercayaan munculnya inovasi dari karang taruna dalam pengelolaan desa wisata yang sesuai dengan perkembangan

zaman. Karang taruna dirasa lebih inovatif dan kreatif untuk memunculkan ide – ide pengelolaan di masa depan karena mengingat keanggotaannya yang merupakan generasi muda. (ii) Adanya kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengatur perencanaan pengelolaan kedepannya. Dalam peran tersebut, pemerintah desa juga mempunyai tugas untuk mengatur penyelenggaraan event meskipun pada setiap pelaksanaan tugasnya berdasarkan koordinasi dengan karang taruna. Dalam menjalin hubungan dengan instansi lain seperti keamanan ataupun dinas – dinas terkait juga menjadi tugas dari pemerintah desa. Dan (iii) adanya kepercayaan untuk tetap melibatkan karang taruna dalam pengelolaan desa wisata di Desa Nganjat meskipun BUMDes sudah terbentuk. Dalam kolaborasi antar *stakeholders* tersebut tentu terdapat hal positif dan negatif didalamnya.

3. Tahapan Komitmen Terhadap Proses (*Commitment To The process*)

Terdapat kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para *stakeholders*. Hal tersebut kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa kolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Dalam pengelolaan desa wisata di Desa Nganjat terdapat peran yang saling berpengaruh sehingga diperlukan koordinasi dalam pelaksanaannya. Koordinasi diperlukan agar pelaksanaan perannya dapat efektif dan efisien. Koordinasi diantara kedua *stakeholders* dilakukan terkait penambahan fasilitas, penyelenggaraan event, dan operasional lapangan. Penambahan fasilitas dilaksanakan berdasarkan kondisi keuangan serta kondisi pengelolaan di lapangan sehingga memerlukan koordinasi diantara kedua *stakeholders*. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan diantara peran kedua *stakeholders*. Dengan keterkaitan tersebut maka dapat meningkatkan komitmen kolaborasi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan desa wisata di Desa Nganjat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan tersebut terdapat peran yang saling terkait sehingga kedua *stakeholders* saling mempengaruhi dalam pelaksanaan peran tersebut. Keterkaitan peran tersebut dapat meningkatkan komitmen kolaborasi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan desa wisata di Desa Nganjat. Dimana tujuan dalam pengelolaan tersebut yaitu untuk meningkatkan PAD desa yang berdampak terhadap pembangunan desa.

4. Tahapan Berbagi Pemahaman (*Shared Understanding*)

Para *stakeholders* harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi.

Terdapat permasalahan dalam aspek koordinasi antar *stakeholder*, dimana koordinasi tidak dilaksanakan secara rutin pada setiap bulannya. Kurangnya koordinasi yang rutin pada setiap bulannya menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai kendala dan kemajuan pengelolaan bagi setiap *stakeholders*. Koordinasi pada saat awal pengelolaan sebenarnya dilakukan secara rutin namun seiring berjalannya waktu terdapat penurunan rutinitas koordinasi. Hal tersebut disebabkan karena kedua *stakeholders* yang bersikap pasif dalam membangun koordinasi.

Dapat disimpulkan bahwa kedua *stakeholders* memahami adanya tujuan dalam pengelolaan tersebut untuk meningkatkan PAD desa yang berguna untuk mempermudah pembangunan dan memberikan dampak bagi masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut juga terdapat rencana pembangunan obyek

wisata yang berkesinambungan. Terdapat kendala dalam tahapan berbagi pemahaman yakni pelaksanaan koordinasi antar *stakeholders* yang kurang rutin setiap bulannya. Koordinasi hanya dilakukan sebatas pembagian hasil tetapi tidak sampai pada laporan pembukuan hasil.

5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*)

Hasil sementara dari proses kolaborasi pengelolaan desa wisata di Desa Nganjat berkaitan dengan hasil pendapatan serta dampak bagi warga. Hasil sementara dari proses kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata di Desa Nganjat diantaranya, (i) adanya pembangunan ruko bagi warga, (ii) terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga, serta (iii) adanya rencana penambahan sarana wisata. Terdapat hasil yang kurang baik yaitu (i) menurunnya pendapatan kolam renang, (ii) penggunaan media sosial yang tidak maksimal, (iii) diperlukan perbaikan fasilitas, dan (iv) berkurangnya sumber daya.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hasil yang baik dari pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan tersebut. Dimana hal tersebut memberikan dampak positif bagi warga. Dampak tersebut berpengaruh juga terhadap perekonomian warga. Terdapat juga hasil yang kurang baik dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata di Desa Nganjat. Hasil tersebut berkaitan dengan pendapatan obyek wisata.

6. Faktor Pendorong Kolaborasi dalam Pengelolaan Desa Wisata di Desa Nganjat

Terdapat banyak aspek yang mendorong pelaksanaan sistem kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata Nganjat. Diantaranya, Pemerintah Desa berharap agar sumber daya alam di Desa Nganjat dapat dikelola oleh generasi muda sehingga dapat menjadi investasi serta dapat menjadi program pemberdayaan masyarakat. Dengan hal tersebut maka akan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda di Desa Nganjat sehingga dapat menekan angka pengangguran di Desa Nganjat. Dengan adanya lapangan kerja tersebut dapat memudahkan masyarakat Desa Nganjat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor lain seperti pabrik ataupun perkantoran.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mendorong pelaksanaan sistem kolaborasi. Selain itu, faktor-faktor tersebut juga berpengaruh terhadap sektor lain diluar sektor pariwisata. Seperti faktor sosial perkenomian, dimana kolaborasi tersebut membantu untuk meningkatkan perekonomian dengan terbukanya lapangan pekerjaan di Desa Nganjat. Serta sistem kolaborasi tersebut meminimalisir perpecahan di Desa Nganjat melalui persatuan masyarakat khususnya anggota Karang Taruna.

7. Faktor Penghambat Kolaborasi dalam Pengelolaan Desa Wisata di Desa Nganjat

Dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Nganjat juga terdapat kendala yang menyebabkan pelaksanaan kolaborasi menjadi kurang maksimal. Kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu kondisi internal Karang Taruna yang belum stabil. Banyaknya anggota Karang Taruna yang disibukkan dengan urusan akademik menjadi salah satu sebab kurang stabilnya internal Karang Taruna. Keanggotaan Karang Taruna yang berasal dari berbagai dusun juga masih belum solid dan kompak sehingga menyebabkan pembagian ataupun manajemen jobdesk di lapangan menjadi kurang efisien. Selain itu, belum adanya Bumdes yang mengakibatkan sistem pengelolaan menjadi kurang profesional.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan sistem kolaborasi tersebut. Kendala tersebut mengakibatkan pelaksanaan sistem kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata menjadi tidak maksimal. Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan obyek wisata kolam renang masih kurang profesional. Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wisata. Diperlukan adanya Bumdes agar pengelolaan tersebut dapat menjadi lebih profesional dan efisien.

KESIMPULAN

Kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Nganjat melibatkan dua *stakeholders* yakni Pemerintah Desa Nganjat dan Karang Taruna Desa Nganjat. Menurut Ansell dan Gash terdapat tahapan – tahapan dalam proses kolaboratif yaitu dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*). Dari kelima tahapan tersebut, masih ditemukan kendala diantaranya pada tahap *Face to Face Dialogue*, *Shared Understanding*, dan *Intermediate Outcome*. Akan tetapi untuk tahapan *Trust Building* dan *Commitment To The Process* sudah berjalan dengan baik.

Terdapat Faktor pendukung kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata Nganjat yaitu terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Nganjat khususnya generasi muda sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terdapat pula faktor penghambatnya yaitu kondisi internal Karang Taruna yang belum stabil, dikarenakan berkurangnya jumlah sumber daya manusia dan internal yang belum solid. Sehingga mengakibatkan pembagian tugas di lapangan menjadi kurang efisien.

SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan untuk meminimalisir kendala dan dalam meningkatkan pengelolaan Desa Wisata di Desa Nganjat, yaitu diperlukan perbaikan pada aspek komunikasi antar *stakeholders*. Komunikasi merupakan kunci pelaksanaan kolaborasi khususnya dalam pengelolaan Desa Wisata. Sehingga perlu adanya koordinasi yang rutin di setiap bulannya untuk melaporkan kemajuan serta kendala pada pelaksanaan pengelolaan tersebut. Kemudian memaksimalkan pemanfaatan media sosial untuk menarik minat wisatawan. Mengingat pada zaman sekarang ini media sosial sangat efektif untuk digunakan sebagai sarana pemasaran.

Selain itu juga menggandeng akademisi untuk menyusun perencanaan pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Tentu diperlukan keterlibatan dari orang – orang yang ahli dalam bidangnya untuk dapat terus mengembangkan wisata yang berkelanjutan serta memaksimalkan peran Bumdes untuk dapat meningkatkan pendapatan sehingga memudahkan dalam melakukan pengembangan fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azwar, Saifuddin. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Erika revida, et al. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Yayasan Kita Menulis
- Goldsmith, S., & Kettl, D.F. (2009). *Unlocking The Power Of Networks: Keys To High-Performance Government*. Brookings Institution Press.
- Perry, James. (2015). *Handbook of Public Administration*. Jossey-Bass
- Stoener, A.F. James, R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert. (1996). *Manajemen*. 6th Edition. Jakarta: PT. Prenhallindo
- Toha, Miftah.(2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta:Prenada Media Group

Jurnal:

- Abdillah, Dariusman. (2016). ” Pengembangan Wisata Bahari Di Pesisir Pantai Teluk Lampung”. *Jurnal Destinasi Kepariwisataaan Indonesia*, 1(1):45-66
- Batara, Andi Surahman, Muhammad Syafar, Sukri Palutturi, dan Stang. (2018). “Pentingnya Kolaborasi Stakeholder Dalam Mewujudkan Terminal Sehat di Sulawesi Selatan”. *The Indonesian Journal of Health Promotion*, 1(1):17-20
- Crisnandye, Yoga Finoza. (2018). “Peran Karang Taruna dalam Pengembangan Kreativitas Remaja (Studi Kasus di Karang Taruna Remaja Kita RW.14 Kelurahan Cibeber Kecamatan

- Cimahi Selatan)". *Jurnal Comm-Edu*, 1(3): 94-100
- Dewi, Made Heny Urmila, Chafid Fandeli, dan M. Baiquni. (2020). "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali". *Jurnal Kawistara* 3(2): 117-226
- Fairuzia, Mia. (2017). "Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)". *Journal Unair*, 5(3)1-13
- Hasan, Fuad. (2017). "Model Pembinaan Transformatif Untuk Program Pembinaan Karang Taruna". *Jurnal Pancaran*, 6(1): 179-192
- Hermawan, Hary. (2016). "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal". *Jurnal Pariwisata*, 3(2): 105-117
- Jiang, Yawei, dan Brent W. Ritchie. (2017). "Disaster Collaboration in Tourism: Motives, Impediments and Success Factors". *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 31: 70-82
- Khatulistyawati, Nuril, et.al. (2021). "Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan Kampung Wisata Ekoriparian Geblak Jambangan". *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat*, 2(2): 317-326
- Maturbongs, Edoardus, dan Ransta Lekatompessy. (2020). "Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Merauke". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1): 55 - 63
- Priyanto, dan Dyah Safitri. (2016). "Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya Tinjauan Terhadap Desa Wisata di Jawa Tengah". *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(1): 76-84
- Putri, Shafira Mediana. (2019). "Kolaborasi Pengembangan Kawasan Geopark Dalam Mewujudkan Destinasi Pariwisata Berkelas Dunia di Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Responsive*, 2(2): 33-39
- Rahu, Philianto Dani. (2021). "Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya". *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan*. 10(1): 13-24
- Setiawan, Ferry, dan Ahmad Saefulloh. (2019). "Kolaborasi yang Dilaksanakan di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(2): 71-80
- Suleman, Syahputra Adisanjaya, dan Nurliana Cipta Apsari. (2017). "Peran Stakeholder Dalam Manajemen Bencana Banjir". *Jurnal Unpad*, 4(1): 1-40
- Suryani, Ade Irma. (2016). "Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal". *Jurnal Spasial*, 3(1):33-42
- Tahir, M. Irwan. (2017). "Modal Efektivitas Organisasi Pemerintah Desa". *Jurnal sosiohumaniora*, 19(3): 233-237
- Umagapi, Darman, dan Arisandy Ambarita. (2018). "Sistem Informasi Geografis Wisata Bahari pada Dinas Pariwisata Kota Ternate". *Jurnal ilmiah Telkominfo*, 1(2):59-69
- Umar, Astuti, Burhanuddin, dan Nasrulhaq. (2019). "Kolaborasi Aktor Dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten

Sinjai, Sulawesi Selatan”. *Matra
Pembaruan*, 3(1):57-66

Widagdo, Ridwan, dan Sri Rokhlinasari.
(2017). ”Dampak Keberadaan
Pariwisata Religi Terhadap
Perkembangan Ekonomi Masyarakat
Cirebon”. *Jurnal Al-Amwal*, 9(1):59-
75

Wondirad, Amare, Denis Tolkach, dan
Brian King. (2020). “Stakeholder
Collaboration as a Major Factor for
Sustainable Ecotourism
Development in Developing
Countries”. *Tourism Management*, 78:
1-21

Lain-Lain:

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 1
Tentang Desa

Peraturan Menteri Pariwisata Republik
Indonesia nomor 14 tahun 2016
Tentang Pedoman Destinasi Wisata
berkelanjutan

Internet:

<https://klatenkab.go.id/> (diakses pada 12
Januari 2023 Pukul 20.03)